



► PENATAAN WILAYAH

Kawasan Kumuh di Jogja Masih 21 Ha

JOGJA—Kawasan kumuh masih ada di wilayah Kota Jogja. Hingga Oktober 2019, tercatat masih ada sekitar 21 hektare (ha) yang masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Luqas Subarkah
luqas@harianjogja.com

Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Jogja, Mahmud Al Haris, mengatakan Hingga akhir tahun lalu, kawasan kumuh di Jogja yang ditangani mencapai total 231,58 hektare, sehingga untuk tahun ini menyisakan 50,39 hektare.

Dia menjelaskan sebagian besar kawasan kumuh di Kota Jogja berada di sekitar bantaran sungai. Permukiman di bantaran sungai, menurut dia, acap luput dari perhatian. "Sungai jadi belakang permukiman, terabaikan dan jarang tersentuh," ujarnya kepada wartawan di sela-sela *Lokakarya Sosialisasi Kotaku menuju Kota Jogja Bebas Kumuh 2019* yang digelar di Balai Kota Jogja, Rabu (9/10).

► Sebagian besar kawasan kumuh di Kota Jogja berada di sekitar bantaran sungai.

► Dalam penilaian, Kotaku menerapkan tujuh indikator dan 19 kriteria.

Hingga Oktober tahun ini, imbuh Mahmud, kawasan kumuh di Kota Jogja tersisa sekitar 21 hektare yang tersebar di sembilan kelurahan. Dia optimistis sampai akhir tahun Jogja sudah bebas dari kawasan kumuh.

Meski begitu, bebas kawasan kumuh belum berarti memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan pemerintah. Dalam penilaian, Kotaku menerapkan tujuh indikator dan 19 kriteria. "Bebas kawasan kumuh itu ketika nilainya sudah di bawah 18, dan itu ada penilaiannya sendiri. Jadi walau sudah tidak ada kawasan kumuh, namun masih ada indikator yang belum selesai," katanya.

Lurah Giwangan, Anggit Syafrudin, menuturkan program Kotaku di wilayahnya dibagi dalam dua kategori, yakni skala lingkungan dan skala kawasan. Kegiatan skala lingkungan dikerjakan oleh warga yang tergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), sedangkan kegiatan

skala kawasan dikerjakan oleh Satker Lementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

Kegiatan skala lingkungan di Kelurahan Giwangan di antaranya pembangunari sanitasi dan jalan di RW 8 dan RW 6. "Dengan kegiatan ini kami menciptakan instalasi pengolahan air limbah [IPAL] Komunal untuk 10-15 KK yang ada di sana, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang limbah keluarga pakai pralon masuk sungai. Semua harus masuk IPAL," ujarnya.

Untuk kegiatan skala kawasan dilakukan penataan bantaran sisi barat Kali Gajah Wong. Penataan ini mengambil konsep Mundur Munggah Madep Kali (M3K). Sebanyak 24 rumah telah mundur dan dihadapkan ke sungai. "Dalam membangun kembali rumah yang telah mundur itu warga mendapat bantuan dari APBD Jogja sebesar Rp10 juta sampai Rp15 juta per rumah," katanya.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005